



Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

BerAKHLAK #bangga
melayani
banasa



RENCANA KERJA

2024

**Badan
Kepegawaian
dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia**

**Kabupaten
Mojokerto**

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Daftar tabel	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	52
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	56
3.3 Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah.....	58
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	62
BAB V PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2021.....	14
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022.....	15
Tabel 2.3 (TC.30) Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	25
Tabel 2.4 (TC.31) Review terhadap rancangan awal Renja Perangkat Daerah tahun 2022.....	33
Tabel 2.5 (TC.32) Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan APBD tahun 2022	51
Tabel 4.1 Matrik rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Mojokerto tahun 2022.....	63

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Pembangunan yang direncanakan secara baik berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah disusun melalui mekanisme dan dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang disusun pada Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dan penjabaran atas dokumen perencanaan daerah lima tahun.

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan selama satu tahun kedepan, yang merupakan pedoman pelaksanaan diharapkan dapat memberikan arah dan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Perangkat Daerah dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Demikian semoga tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja ini dapat terwujud sesuai dengan harapan kita semua.

Mojokerto, 30 Juni 2023

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP 19660618 199003 1 011



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi adalah sekumpulan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto di bentuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam bidang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menciptakan aparat yang profesional yaitu berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, netral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berwawasan kesatuan dan kebangsaan sehingga dapat melayani masyarakat dan dunia usaha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Persiapan penyusunan renja meliputi :
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
 - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk

diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah dengan maksud dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja

Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah untuk disempurnakan dan disampaikan kembali kepada kepala BAPPEDA. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

6. Penetapan

BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan, Rancangan Awal Renja BKPSDM tahun 2024 memuat kebijakan, program kerja prioritas, kegiatan pembangunan beserta pendanaannya sehingga tercipta keselarasan dalam rangka pembangunan Daerah. Rancangan Awal Renja yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi organisasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip :

1. Mengacu pada rancangan awal RKPD tahun yang bersangkutan, yang digunakan untuk merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif;
2. Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penetapan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju tahun berikutnya;
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagai landasan perumusan kegiatan alternatif untuk mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
4. Sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi

kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah serta dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah:

1. Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 – 2026;
 27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 28. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Merupakan arah dan pedoman/acuan dalam penyelenggaraan pembangunan SDM Aparatur dalam jangka 1 (satu) tahun kedepan di tahun 2024;
2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pembangunan SDM Aparatur;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN;

Pada bagian ini di jelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjut proses penyusunan Rancangan APBD.

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal P-RKPD

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

Sajian Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2024.

Bab IV P E N U T U P

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 secara umum selaras dengan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto dalam tahun ini mempunyai 3 (tiga) program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan.

Bahwa dalam penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Mojokerto, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Mojokerto tahun 2022 terdapat 3 (Tiga) program, 12 (Dua belas) kegiatan dan 28 (Dua puluh delapan) Sub Kegiatan yang sangat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Mojokerto tahun 2022 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencakup kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan Mebel
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Kepegawaian Daerah, mencakup kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - Pengelolaan Data Kepegawaian.
 - b. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengelolaan Mutasi ASN;

- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
 - c. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
 - d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 - Pembinaan Disiplin ASN.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, mencakup kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;

Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto per tanggal 31 Desember 2022 sebesar 86,30% dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran sebelum Perubahan APBD	Rp. 17.268.587.434,00
- Pengurangan APBD	Rp. 5.939.547.951,00
- Anggaran setelah Perubahan APBD	Rp. 11.329.039.483,00
- Realisasi	Rp. 9.992.205.209,00
- Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp. 1.586.834.274,00

Realisasi anggaran telah melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 86%. Meskipun demikian, realisasi anggaran belum maksimal karena ada beberapa kegiatan yang masih belum bisa dilaksanakan

antara lain proses pengangkatan PPPK JF Guru sebanyak 225 orang tidak dapat dituntaskan di tahun 2022 karena menyesuaikan dengan Jadwal Pengadaan PPPK dari Panselnas, dimana jadwal pengadaan PPPK JF Guru berlangsung sampai dengan Bulan Maret 2023.

Adapun capaian kinerja tahun 2022 sesuai dengan yang diperjanjikan dapat diuraikan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Integritas dan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Mojokerto	81	67,22	83%
2	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Persentase meningkatnya ASN dengan IP ASN Kategori Tinggi	72%		0%
		Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi	77%	97%	126%
		Persentase peningkatan kualifikasi ASN	72,20%	72,44%	100,33%
		Persentase peningkatan kinerja ASN	99,75%	99,41%	99,66%
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,25%	0,19%	123%
		Persentase peningkatan kompetensi ASN	60,10%	76,97%	128%
3	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	90%	80%	89%
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	86%	86,30%	100%
		Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah	81	77,34	95%
		Nilai SAKIP perangkat daerah	84	79,98	95%
		Nilai Reformasi Birokrasi perangkat daerah	61,5	82,85	135%
4	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2	2	100%

Tabel 2.2 T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KABUPATEN MOJOKERTO

BADAN KEPEGAWAIN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022 n	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan (Bulan Desember)					
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2021 (tahun n-1) 10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 11=(10/4)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
4	05				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian									
04	05	06			Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan									
04	05	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
04	05	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	72 Bulan	100
04	05	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan / perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	36 Unit	24 Unit	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	36 unit	100
04	05	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	72 Bulan	100
04	05	06	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	72 Bulan	100
04	05	06	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	72 Bulan	100

04	05	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan mamin tamu dan rapat yang disediakan	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	72 Bulan	100
04	05	06	01	21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas yang dibutuhkan	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	72 Bulan	100
04	05	06	01	23	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	Jumlah Penyediaan jasa dan tenaga kerja yang dibutuhkan selama 12 bulan	36 Tenaga Non PNS	24 Tenaga Non PNS	6 Tenaga Non PNS	6 Tenaga Non PNS	100	6 Tenaga Non PNS	36 Tenaga Non PNS	100
04	05	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	98%
04	05	06	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas operasional roda empat	1 Unit	-	1 Unit	-	100	-	1 Unit	100
04	05	06	02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis meubel yang tersedia	4 Set	-	4 Set	-	100	-	4 Set	100
04	05	06	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung yang dilakukan	6 gedung	4 gedung	1 gedung	1 gedung	100	1 gedung	6 gedung	100
04	05	06	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional yang di lakukan	36 Unit	20 Unit	6 unit	4 unit	100	6 Unit	32 unit	88
04	05	06	02	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang di lakukan	24 Jenis	18 Jenis	6 jenis	6 jenis	100	6 Jenis	24 Jenis	100
04	05	06	02	29	Pemeliharaann Rutin Gedung Balai Diklat	Jumlah Pemeliharaan Gedung Balai Diklat yang dilakukan	3 gedung	3 gedung	-	-	-	-	3 gedung	100
04	05	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentas pegawai dengan tingkat kedisiplinan kedinasn sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
04	05	06	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	118 stel	114 stel	-	-	-	-	114 stel	97
04	05	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja organisasi yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
04	05	06	06	05	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja OPD yang dihasilkan	42 dokumen	35 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	7 dokumen	42 dokumen	100
04	05	06	28		Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan lulus dengan predikat baik	100 %	99 %	-	-	-	-	100%	100%
04	05	06	28	01	Pengiriman Peserta Diklat Teknis Fungsional	Jumlah Peserta Diklat yang dikirim	158 orang	148 orang	-	-	-	-	148 orang	94
04	05	06	28	02	Diklat Kepemimpinan	Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatannya	187 orang	187 orang	-	-	-	-	187 orang	100

04	05	06	28	03	Diklat Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti prajabatan	190 orang	50 orang	-	-	-	-	190 orang	100
04	05	06	28	04	Diklat Teknis Struktural/Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti diklat sesuai dengan hasil analisa kebutuhan diklat	1750 orang	1184 Orang	-	-	-	-	3004 orang	172
04	05	06	28	07	Pengelolaan Administrasi Ijin Belajar	Jumlah ASN yang mengajukan ijin belajar	643 orang	557 orang	-	-	-	-	718 orang	117
04	05	06	28	05	Penyelenggaraan Ujian Dinas	Jumlah peserta yang ikut Ujian Dinas	10 orang	-	-	-	-	-	14 orang	104
04	05	06	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan formasi kebutuhan dan syarat jabatan	81 %	83,72 %	-	-	-	-	99,38 %	99,38 %
04	05	06	30	04	Pemeliharaan SIMPEG	Jumlah Aplikasi yang terawat / terpelihara	4 Aplikasi	4 Aplikasi	-	-	-	-	4 Aplikasi	100
04	05	06	30	09	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian	Jumlah buku profil dan informasi kepegawaian	Buku profil 300, DUK 12, Bezzeting 12	Buku profil 300, DUK 12, Bezzeting 12	-	-	-	-	Buku profil 300, DUK 12, Bezzeting 12	100
04	05	06	30	09	Penataan dan Pemeliharaan Arsip perorangan PNS	Jumlah file PNS yang terpelihara	17.246 PNS	17.246 PNS	-	-	-	-	17.246 PNS	100
04	05	06	30	07	Pengembangan SIMPEG	Jumlah Aplikasi yang di kembangkan	4 Aplikasi	4 Aplikasi	-	-	-	-	4 Aplikasi	100
04	05	06	30	09	Pelayanan dan Pengolahan Data PNS	Jumlah identitas pegawai yang diterbitkan	3215 PNS	3215 PNS	-	-	-	-	3215 PNS	100
04	05	06	30	01	Peningkatan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah berkas kepegawaian (Kenaikan pangkat, pension, dll) ASN yang di kelola	3964 berkas	3964 berkas	-	-	-	-	3964 berkas	100
04	05	06	30	08	Penyusunan Formasi ASN	Jumlah dokumen penyusunan Formasi ASN yang tersusun	302 pengelola kepegawaian	302 pengelola kepegawaian	-	-	-	-	302 pengelola kepegawaian	100
04	05	06	30	05	Penyusunan Program Pengembangan Pegawai	Jumlah dokumen program pengembangan yang tersusun	158 OPD	158 OPD	-	-	-	-	158 OPD	100
04	05	06	30	10	Pengadaan CPNS ASN	Jumlah CPNS yang di terima	179 orang	175 orang	-	-	-	-	175 orang	98
04	05	06	30	07	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural	Jumlah pejabat yang di mutasi	480 PNS	308 PNS	-	-	-	-	308 PNS	64
04	05	06	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase peningkatan capaian penilaian prestasi kinerja ASN dengan nilai baik	99,01 %	99,04 %	-	-	-	-	84%	84%

04	05	06	30	13	Pengujian Kesehatan Bagi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti general check up bagi pejabat struktural / PNS	710 orang	710 orang	-	-	-	-	710 orang	100
04	05	06	30	18	Pemberian Penghargaan PNS	Jumlah PNS yang menerima penganugerahan Satyalancana Karya Satya	502 orang	444 orang	-	-	-	-	444 orang	88
04	05	06	30	36	Pengelolaan Administrasi Penilaian Kerja PNS	Jumlah ASN yang melaporkan penilaian prestasi kerjanya tepat waktu	41.500 PNS	24.589 PNS	-	-	-	-	24.589 PNS	59
04	05	06	30	52	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai ASN yang lebih terukur dan memiliki kredibilitas dan realibitas ketersediaan data	82	73	82	73	89	83	73	89
04	05	06	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS	99 %	33,33 %	-	-	-	-		
04	05	06	30	06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen Monitoring evaluasi dan pelaporan	6 dokumen	5 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	83
04	05	06	30	10	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Jumlah PNS yang wajib lapor LP2P	17178 PNS	16765 PNS	-	-	-	-	16765 PNS	98
04	05	06	30	14	Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	Jumlah laporan LHKPN penyelenggara negara yang wajib lapor LHKPN	850 orang	306 WL	-	-	-	-	306 orang	36
04	05	06	30	16	Pelaksanaan Sumpah PNS	Jumlah PNS yang mengikuti sumpah	500 orang	60 orsng	-	-	-	-	60 orang	12
04	05	06	30	21	Revolusi Mental ASN	Jumlah peserta yang ikut pembinaan	500 peserta	280 peserta	-	-	-	-	280 peserta	56
04	05	06	30	29	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Presensi Berbasis Finger Print On Line	Jumlah aplikasi dan jaringan Mesin Finger Print	6 aplikasi	5 aplikasi (492 node jaringan)	-	-	-	-	5 aplikasi (492 node jaringan)	83
04	05	06	30	45	Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin yang di selesaikan	31 PNS	31 PNS	-	-	-	-	31 PNS	100
04	05	06	30	46	Penyelesaian Kasus Rumah Tangga	Jumlah Kasus rumah tangga PNS yang di selesaikan	44 PNS	29 PNS	-	-	-	-	52 PNS	118
04	05	06	30	47	Peningkatan Disiplin Pegawai	Persentase tingkat kehadiran PNS	100 %	85%	-	-	-	-	85 %	85
04	05	06	30	48	Pembinaan dan Evaluasi Manajemen Kepegawaian	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan dan Evaluasi Manajemen Kepegawaian	452peserta	443 peserta	-	-	-	-	443 peserta	98

04	05	06	31		Program penatausahaan ASN	Persentase ASN yang menduduki Jabatan sesuai dengan formasi kebutuhan dan syarat jabatan	84 %	-	-	-	-	84 %	0	0
04	05	06	31	01	Peningkatan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah berkas kepegawaian (Kenaikan pangkat, pension, dll) ASN yang di kelola	3905 berkas	1894 berkas	-	-	-	-	1894 berkas	49
04	05	06	31	02	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural	Jumlah ASN yang di mutasi	1445 PNS	975 PNS	-	-	-	-	975 PNS	67
04	05	06	31	03	Pelayanan dan Pengolahan Data PNS	Jumlah identitas pegawai yang diterbitkan	5000 PNS	3417 PNS	-	-	-	-	3417 PNS	1139
04	05	06	31	04	Pemeliharaan SIMPEG	Jumlah Aplikasi yang terawat / terpelihara	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	-	-	1 Aplikasi	68
04	05	06	31	05	Penyusunan Program Pengembangan Pegawai	Jumlah dokumen program pengembangan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	100
04	05	06	31	06	Penataan dan Pemeliharaan Arsip perorangan PNS	Jumlah file PNS yang terpelihara	8120 PNS	8120 PNS	-	-	-	-	8120 PNS	100
04	05	06	31	07	Pengembangan SIMPEG	Jumlah Aplikasi yang di kembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	-	-	1 Aplikasi	100
04	05	06	31	08	Penyusunan Formasi ASN	Jumlah dokumen penyusunan Formasi ASN yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	100
04	05	06	31	09	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian	Jumlah buku profil dan informasi kepegawaian	Buku profil 275, Duk 12, Bezeting 12	Buku profil 275, Duk 12, Bezeting 12	-	-	-	-	Buku profil 275, Duk 12, Bezeting 12	100
04	05	06	31	11	Rekonsiliasi Data ASN	Jumlah ASN yang terekonsiliasi datanya	8317 data	8317 data	-	-	-	-	8317 data	100
04	05	06	31	12	Pengadaan PPPK	Jumlah PPPK yang di terima dan di angkat	373 orang	-	-	-	-	-	-	-
04	05	06	32	03	Perencanaan dan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen pemenuhan kebutuhan/formasi ASN	10 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Program Kegiatan Tahun 2020														
4	05	06	32		Program Pengembangan ASN	Persentase ASN yang mengikutipelatihandan lulus denganpredikatbaik	93%	-	93%	100%	117%		100%	117%
4	05	06	32	01	Peningkatan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikutipeningkatankompetensi	130 ASN	-	130 ASN	176 ASN	135		130 ASN	135
4	05	06	32	02	Pelatihan Dasar/Prajabatan ASN	Jumlah ASN yang mengikutitlatihandasar/prajabatan	60 CPNS	-	60 CPNS	60 CPNS	100		60 CPNS	100
						Persentasekebutuhan ASN sesuaidenganAnjabdan ABK	85%	-	85%	87,57%	100%		87,57%	100%

4	05	06	32	03	Perencanaan dan pengadaan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan/ formasi ASN	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100		4 Dokumen	100
						Persentase ASN yang mendapatkan tunjangan kinerja	95%	-	95%	99,63%	100%		99,63%	100%
4	05	06	32	04	Pengembangan karier ASN	Jumlah dokumen pengembangan ASN	5 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100		5 Dokumen	100
4	05	06	33		Program Penataan ASN	Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai syarat jabatan	84,75%	-	84,75%	84,80 %	101%		84,80 %	101%
4	05	06	33	01	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah berkas Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun, dll) ASN yang di kelola	2150 Berkas	-	2150 Berkas	1970 Berkas	92		1970 Berkas	92
4	05	06	33	02	Pelaksanaan Mutasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang di mutasi	730 ASN	-	730 ASN	947 ASN	130		947 ASN	130
4	05	06	34		Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian	Persentase peningkatan pencapaian penilaian prestasi kinerja ASN dengan nilai baik	99,04%	-	99,04%	99,69%	92%		99,69%	92%
4	05	06	34	01	Peningkatan Kinerja ASN	Jumlah dokumen peningkatan kinerja ASN	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100		2 Dokumen	100
4	05	06	34	02	Evaluasi Manajemen ASN	Indeks pelayanan kepegawaian	250 (Baik)	-	250 (Baik)	209,5(kurang)	84		209,5(kurang)	84
						Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	9%	-	9%	10%	100		10%	100
4	05	06	34	03	Pembinaan ASN	Jumlah dokumen pembinaan ASN	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100		4 Dokumen	100
						Persentase akurasi data kepegawaian	75%	-	75%	75%	109		75%	109
4	05	06	34	04	Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai ASN	Jumlah aplikasi yang terkelola	6 Aplikasi	-	6 Aplikasi	6 Aplikasi	100		6 Aplikasi	100
4	05	06	34	05	Rekonsiliasi Data ASN	Jumlah data ASN yang telah di rekonsiliasi	8350 data ASN	-	8350 data ASN	9177 data ASN	101		9177 data ASN	101
4	05	06	34	06	Pengelolaan dokumen kepegawaian ASN	Jumlah dokumen perorangan ASN yang dikelola	8350 dokumen kepegawaian	-	8350 dokumen kepegawaian	10654 dokumen kepegawaian	127		10654 dokumen kepegawaian	127
Program kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021														
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5	03				Kepegawaian									
5	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%		

5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	85%	72%
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang dapat Tersusun	7 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Dokumen	3 Dokumen	43%
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang dapat Tersusun	4 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	91%	n/a	n/a	n/a	n/a	91%	77%	72%
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Pegawai yang Dapat Gaji dan Tunjangan	45 ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	45 ASN	40 ASN	89%
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	6 Bulan	50%
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	76%	n/a	n/a	n/a	n/a	76%	35%	46%
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Jenis peralatan	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Jenis peralatan	0	0%
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis kudapan	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Jenis kudapan	3 Jenis kudapan	100%
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	14 Jenis barang cetakan	n/a	n/a	n/a	n/a	14 Jenis barang cetakan	8 Jenis barang cetakan	57,14%
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Penyediaan Bahan / Material yang Disediakan	39 Jenis ATK	n/a	n/a	n/a	n/a	39 Jenis ATK	6 Jenis ATK	15,4%
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disediakan	5 Jenis kudapan	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Jenis kudapan	3 jenis kudapan	60%
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	6 Bulan	50%
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84%	n/a	n/a	n/a	n/a	84%	75%	75%
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan Listrik	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	6 Bulan	50%
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibutuhkan selama 12 Bulan	6 Tenaga Non PNS	n/a	n/a	n/a	n/a	6 Tenaga Non PNS	6 Tenaga Non PNS	100%
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	87%	n/a	n/a	n/a	n/a	87%	46%	53%
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan / Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	6 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	6 Unit	3 Unit	50%

5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Gedung	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Gedung	0	0%
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dilakukan	6 Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	6 Jenis	3 Jenis	50%
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Nilai Hasil Penilaian Sistem Merit dengan kategori Baik	250 Kategori baik	n/a	n/a	n/a	n/a	250 Kategori baik	209,5	83,8%
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan / Formasi ASN, Pemberhentian dan Aplikasi Sistem Informasi yang Dikelola	- 4 Dokumen - 7 Aplikasi - 8000 Data	n/a	n/a	n/a	n/a	- 4 Dokumen - 7 Aplikasi - 8000 Data	- 7 Aplikasi - 5809 Data ASN	72%
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan / Formasi ASN	4 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Dokumen	0	0%
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi manajemen ASN yang Dikelola dan Berfungsi dengan Baik	7 Aplikasi	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Aplikasi	7 Aplikasi	100%
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang Telah Direkonsiliasi dan Arsip Perorangan ASN yang Dikelola	8000 Data	n/a	n/a	n/a	n/a	8000 Data	5809 Data ASN	53%
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi / Promosi ASN dan ASN yang Naik Pangkat	- 775 ASN - 2170 berkas	n/a	n/a	n/a	n/a	- 775 ASN - 2170 berkas	- 487 ASN - 1009 berkas	51%
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang Dimutasi	775 ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	775 ASN	487 ASN	65%
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Berkas Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun dll) ASN yang Dikelola	2170 berkas	n/a	n/a	n/a	n/a	2170 berkas	1009 berkas	46%
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Menempuh Pendidikan Lanjutan	157 PNS	n/a	n/a	n/a	n/a	157 PNS	63 PNS	40%
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Melakukan Pendidikan Lanjutan	157 PNS	n/a	n/a	n/a	n/a	157 PNS	63 PNS	40%
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Laporan dan Evaluasi Kinerja ASN, Pemberian Penghargaan dan Jumlah Sanksi Penjatuhan Hukuman Disiplin	- 2 Dokumen - 100 PNS - 3 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	- 2 Dokumen - 100 PNS - 3 Dokumen	1 Dokumen	1%
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja ASN	2 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Menerima Penghargaan	100 PNS	n/a	n/a	n/a	n/a	100 PNS	0	0%
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Pembinaan ASN	3 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Dokumen	0	0%
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	97%	n/a	n/a	n/a	n/a	97%	0	0%

5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi ASN	598 PNS	n/a	n/a	n/a	n/a	598 PNS	251 PNS	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi ASN	598 PNS	n/a	n/a	n/a	n/a	598 PNS	251 PNS	42%
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah CPNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar / Prajabatan	396 CPNS	n/a	n/a	n/a	n/a	396 CPNS	40 CPNS	10%
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar / Prajabatan	396 CPNS	n/a	n/a	n/a	n/a	396 CPNS	40 CPNS	10%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Melihat kondisi tersebut diatas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto hanya melaksanakan urusan pemerintah urusan penunjang, yang tidak menggunakan indikator rencana kerja pembangunan daerah seperti, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar Pelayanan Kerja (NPSK). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto adalah Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan Indikator penunjang urusan pemerintahan daerah.

Sebagaimana dapat di uraikan pada Tabel TC-30

Tabel 2.3 TC.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Rentsra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				2021	2022	2023	2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
				(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n+2)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Jumlah Waktu penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perizinan kendaraan dinas/operasional	n/a	n/a	6 unit	6 unit	n/a	n/a	6 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	n/a	n/a	14 jenis	5 jenis	n/a	n/a	5 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas yang dibutuhkan	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Kerja Yang dibutuhkan selama 12 bulan	n/a	n/a	6 Tenaga non PNS	6 Tenaga non PNS	n/a	n/a	6 Tenaga non PNS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

9	Jumlah jenis meubel yang tersedia	n/a	n/a	n/a	4 set	n/a	n/a	4 set	n/a	n/a	n/a	n/a
10	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas operasional roda empat	n/a	n/a	n/a	1 Unit	n/a	n/a	1 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a
11	Jumlah Pemeliharaan Gedung yang dilakukan	n/a	n/a	3 gedung	1 gedung	n/a	n/a	1 gedung	n/a	n/a	n/a	n/a
12	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilakukan	n/a	n/a	6 unit	6 unit	n/a	n/a	6 unit	n/a	n/a	n/a	n/a
13	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dilakukan	n/a	n/a	6 jenis	6 jenis	n/a	n/a	6 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a
14	Jumlah Pemeliharaan Gedung Balai Diklat yang dilakukan	n/a	n/a	3 gedung	n/a	n/a						
15	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	n/a	n/a	38 stel	n/a	n/a						
16	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja OPD yang dihasilkan	n/a	n/a	7 dokumen	7 dokumen	n/a	n/a	7 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a
17	Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatannya	n/a	n/a	45 orang	n/a	n/a						
18	Jumlah ASN yang mengikuti prajabatan	n/a	n/a	175 orang	n/a	n/a						
Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021												
19	Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang dapat Tersusun	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Dokumen	5 Dokumen	n/a	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	n/a
20	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang dapat Tersusun	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Dokumen	6 Dokumen	n/a	0	6 Dokumen	6 Dokumen	n/a

21	Jumlah Pegawai yang Dapat Gaji dan Tunjangan / Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan	n/a	n/a	n/a	n/a	45 ASN	12 Bulan	n/a	40 ASN	12 Bulan	12 Bulan	n/a
22	Jumlah Waktu Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	6 Bulan	n/a	n/a	n/a
23	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Jenis peralatan	8 jenis peralatan dan perlengkapan	n/a	0	7 jenis peralatan dan perlengkapan	7 jenis peralatan dan perlengkapan	n/a
24	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan / Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Jenis kudapan	12 Bulan	n/a	3 Jenis kudapan	12 Bulan	12 Bulan	n/a
25	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	14 Jenis barang cetakan	14 jenis barang cetak dan penggandaan	n/a	8 Jenis barang cetakan	14 jenis barang cetak dan penggandaan	14 jenis barang cetak dan penggandaan	n/a
26	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	n/a
32	Jumlah Penyediaan Bahan / Material yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	39 Jenis ATK	13 jenis ATK	n/a	6 Jenis ATK	13 jenis ATK	14 jenis ATK	n/a
33	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang Disediakan / Jumlah Waktu Fasilitas Kunjungan Tamu yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Jenis kudapan	12 Bulan	n/a	3 jenis kudapan	12 Bulan	12 Bulan	n/a
34	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	n/a	6 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	n/a
35	Jumlah unit Meubeler yang tersedia	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25 Unit	n/a	n/a	25 Unit	n/a	n/a
36	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan Listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	n/a	6 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	n/a
37	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibutuhkan selama 12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	6 Tenaga Non PNS	6 Tenaga Non PNS	n/a	6 Tenaga Non PNS	6 Tenaga Non PNS	6 Tenaga Non PNS	n/a
38	Jumlah Pemeliharaan / Perpanjangan Perizinan	n/a	n/a	n/a	n/a	6 Unit	6 Unit	n/a	3 Unit	6 Unit	6 Unit	n/a

	Kendaraan Dinas / Operasional											
39	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Gedung	1 Gedung	n/a	0	1 Gedung	1 Gedung	n/a
40	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dilakukan	n/a	n/a	n/a	n/a	6 Jenis	6 Jenis	n/a	3 Jenis	6 Jenis	7 Jenis	n/a
41	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan / Formasi ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Dokumen	4 Dokumen	n/a	0	4 Dokumen	4 Dokumen	n/a
42	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi manajemen ASN yang Dikelola dan Berfungsi dengan Baik	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Aplikasi	7 Aplikasi	n/a	7 Aplikasi	7 Aplikasi	8 Aplikasi	n/a
43	Jumlah Data ASN yang Telah Direkonsiliasi dan Arsip Perorangan ASN yang Dikelola	n/a	n/a	n/a	n/a	8000 Data	7640 Data	n/a	5809 Data ASN	7640 Data	7175 Data	n/a
44	Jumlah ASN yang Dimutasi	n/a	n/a	n/a	n/a	775 ASN	775 ASN	n/a	487 ASN	775 ASN	800 ASN	n/a
45	Jumlah Berkas Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun dll) ASN yang Dikelola	n/a	n/a	n/a	n/a	2170 berkas	2170 berkas	n/a	1009 berkas	2170 berkas	2170 berkas	n/a
46	Jumlah ASN yang Melakukan Pendidikan Lanjutan	n/a	n/a	n/a	n/a	157 PNS	157 PNS	n/a	63 PNS	157 PNS	125 PNS	n/a
47	Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Dokumen	2 Dokumen	n/a	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	n/a
48	Jumlah ASN yang Menerima Penghargaan	n/a	n/a	n/a	n/a	100 PNS	100 PNS	n/a	0	100 PNS	100 PNS	n/a
49	Jumlah Dokumen Pembinaan ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Dokumen	3 Dokumen	n/a	0	3 Dokumen	3 Dokumen	n/a
50	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	598 PNS	6589 ASN	n/a	251 PNS	6589 ASN	5250 ASN	n/a
51	Jumlah CPNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar / Prajabatan	n/a	n/a	n/a	n/a	396 CPNS	98 CPNS	n/a	40 CPNS	98 CPNS	461 CPNS	n/a

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut:

- a. Perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian berdasarkan manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien;
- b. Pengembangan kompetensi ASN untuk mewujudkan SDM Aparatur yang unggul;
- c. Implementasi sistem manajemen kinerja yang efektif untuk mewujudkan ASN yang *smart*, *agile* dan *emphaty*
- d. Implementasi manajemen kinerja berbasis elektronik;
- e. Optimalisasi implementasi NSPK.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Secara organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto bertugas memimpin, melakukan koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan. Kewenangan BKPSDM untuk melaksanakan fungsi tersebut meliputi :

1. Perumusan kebijakan dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

4. Pelaksanaan administrasi dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. Faktor Permasalahan Internal, hambatan :

- 1) Aplikasi Kepegawaian Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi;
- 2) Kurang optimalnya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- 3) Kurang dapat maksimalnya layanan administrasi kepegawaian.

2. Faktor Permasalahan External, hambatan :

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Pegawai pemerintah kabupaten Mojokerto masih 54% dari Jumlah total kebutuhan ASN.
- 2) Jumlah Tenaga Guru banyak yang pensiun
- 3) Jumlah Tenaga kesehatan banyak yang pensiun dan meninggal dunia terkena dampak pandemi covid-19
- 4) Jumlah Tenaga Fungsional pelayanan dasar yang telah BUP dan meninggal dunia beban kerjanya tidak dapat dialihkan sehingga harus dilakukan pengisian secepatnya melalui mekanisme pengadaan ASN

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026 satu diantaranya yaitu keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Disamping itu, pengembangan kompetensi SDM Aparatur BKPSDM yang belum optimal, perlu ditingkatkan lagi agar dapat mencapai target SDG's.

Tantangan dan permasalahan serta isu-isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi / catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto yaitu;

1. Mengoptimalkan Sinkronisasi dan Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah berkaitan Program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap perencanaan yang ada;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme ASN;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi yang ada;
4. Optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan secara lebih terstruktur dan terorganisir.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupatendengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik),

Tabel 2.4 TC.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO

Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				PAGU SESUAI PROYEKSI ANGGARAN (APBD TA 2023)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				PAGU SESUAI KEBUTUHAN (USULAN SKPD)
	OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET RENJA 2023			OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET RENJA 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
KEPEGAWAIAN						KEPEGAWAIAN					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A)	6.030.454.333	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A)	6.030.454.333
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 Inovasi					Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 Inovasi	

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target		90%	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target		90%	10.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 dokumen	5.000.000
Penyusunan Renja, RKA, Perubahan Renja, P-RKA, PPRG					5.000.000	Penyusunan Renja, RKA, Perubahan Renja, P-RKA, PPRG					5.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 Laporan	5.000.000
Penyusunan LPPD, LKPJ, Laporan Evaluasi Tribunal 1-4, LKJIP					5.000.000	Penyusunan LPPD, LKPJ, Laporan Evaluasi Tribunal 1-4, LKJIP					5.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		88%	5.322.164.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		88%	5.322.164.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			38 Orang/bulan	5.322.164.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			38 Orang/bulan	5.322.164.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.322.164.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.322.164.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah		82	80.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah		82	80.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			38 paket	80.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			38 paket	80.000.000
Pakaian Dinas Khaki					14.350.000	Pakaian Dinas Khaki					14.350.000
Pakaian Dinas Hitam Putih					25.000.000	Pakaian Dinas Hitam Putih					25.000.000
Pakaian Dinas Batik Diwangkara Wilwatikta					14.150.000	Pakaian Dinas Batik Diwangkara Wilwatikta					14.150.000
Pakaian Olahraga					25.000.000	Pakaian Olahraga					25.000.000
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.500.000	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		87%	279.967.353	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		87%	279.967.353
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	75.000.000
Layar Proyektor Otomatis					5.350.000	Layar Proyektor Otomatis					5.350.000
Televisi					10.650.000	Televisi					10.650.000
Laptop					43.350.000	Laptop					43.350.000
Printer					6.900.000	Printer					6.900.000
Scanner					7.250.000	Scanner					7.250.000

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.500.000	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			7 paket	14.160.853	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			7 paket	14.160.853
Belanja Makanan dan Minuman serta Snack rapat					14.160.853	Belanja Makanan dan Minuman serta Snack rapat					14.160.853
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6 paket	48.150.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6 paket	48.150.000
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					48.150.000	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					48.150.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			20 dokumen	21.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			20 dokumen	21.400.000
Belanja Bahan Bacaran dan Peraturan Perundang-undangan					21.400.000	Belanja Bahan Bacaran dan Peraturan Perundang-undangan					21.400.000
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			6 paket	39.000.000	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			6 paket	39.000.000
Belanja Alat Tulis Kantor untuk Keperluan Kantor					39.000.000	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Keperluan Kantor					39.000.000

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 laporan	9.550.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 laporan	9.550.000
Belanja Makanan dan Minuman serta Snack untuk Tamu					9.550.000	Belanja Makanan dan Minuman serta Snack untuk Tamu					9.550.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	72.706.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	72.706.500
Belanja Perjalanan Dinas, Akomodasi dan Bantuan Transport					72.706.500	Belanja Perjalanan Dinas, Akomodasi dan Bantuan Transport					72.706.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia		12 Unit	45.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia		12 Unit	45.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 unit	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 unit	45.000.000
Kursi Kerja					27.000.000	Kursi Kerja					27.000.000
Meja Rapat Besar					16.500.000	Meja Rapat Besar					16.500.000
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.500.000	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.500.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		91%	191.146.880	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		91%	191.146.880
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	56.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	56.000.000
Belanja Pembayaran Listrik, Telephone dan Internet Kantor					56.000.000	Belanja Pembayaran Listrik, Telephone dan Internet Kantor					56.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	135.146.880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	135.146.880
Belanja Gaji untuk Tenaga Harian Lepas / Non ASN					135.146.880	Belanja Gaji untuk Tenaga Harian Lepas / Non ASN					135.146.880
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		88%	102.176.100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		88%	102.176.100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			6 unit	66.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			6 unit	66.000.000

Belanja Pemeliharaan Kendaraan					60.000.000	Belanja Pemeliharaan Kendaraan					60.000.000
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Dinas					6.000.000	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Dinas					6.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	11.176.100	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	11.176.100
Belanja Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung					11.176.100	Belanja Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung					11.176.100
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			7 unit	25.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			7 unit	25.000.000
Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor					25.000.000	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor					25.000.000
Program Kepegawaian Daerah			Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi	79%	2.075.740.000	Program Kepegawaian Daerah			Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi	79%	2.870.740.000
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		33 dokumen	543.453.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		33 dokumen	1.338.453.000

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN			2 dokumen	43.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN			2 dokumen	43.000.000
Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait					18.000.000	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait					18.000.000
Desk penyusunan kebutuhan ASN					20.000.000	Desk penyusunan kebutuhan ASN					20.000.000
Rapat koordinasi usul kebutuhan ASN					5.000.000	Rapat koordinasi usul kebutuhan ASN					5.000.000
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			3 dokumen	93.923.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			3 dokumen	93.923.000
Fasilitasi, koordinasi dan konsultasi pengangkatan ASN					33.000.000	Fasilitasi, koordinasi dan konsultasi pengangkatan ASN					33.000.000
Penyerahan Keputusan Bupati secara langsung dan Pembekalan ASN					50.000.000	Penyerahan Keputusan Bupati secara langsung dan Pembekalan ASN					50.000.000
Pelaksanaan Sumpah Janji PNS					10.923.000	Pelaksanaan Sumpah Janji PNS					10.923.000
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			4 laporan	0	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			4 laporan	800.000.000

Rapat koordinasi dan konsultasi Pengadaan ASN						Rapat koordinasi dan konsultasi Pengadaan ASN					175.000.000
Pelaksanaan Seleksi Administrasi						Pelaksanaan Seleksi Administrasi					50.000.000
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi						Pelaksanaan Seleksi Kompetensi					550.000.000
Evaluasi pengadaan ASN						Evaluasi pengadaan ASN					25.000.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			12 dokumen	255.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			12 dokumen	250.000.000
Pemeliharaan hardware					25.000.000	Pemeliharaan hardware					25.000.000
Pemeliharaan database dan aplikasi sistem informasi					50.000.000	Pemeliharaan database dan aplikasi sistem informasi					50.000.000
Peremajaan hardware					35.000.000	Peremajaan hardware					30.000.000
Pengembangan aplikasi SIMPEG					100.000.000	Pengembangan aplikasi SIMPEG					100.000.000
Fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait					25.000.000	Fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait					25.000.000
Evaluasi sistem informasi kepegawaian					20.000.000	Evaluasi sistem informasi kepegawaian					20.000.000
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			12 dokumen	151.530.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			12 dokumen	151.530.000
Rekonsiliasi data ASN					30.000.000	Rekonsiliasi data ASN					30.000.000
Pembuatan DUK, Bezetting, Buku profil ASN dan Buletin kepegawaian					25.000.000	Pembuatan DUK, Bezetting, Buku profil ASN dan Buletin kepegawaian					25.000.000

Pelayanan pengolahan data, perbaikan data, Kartu Identitas ASN					15.000.000	Pelayanan pengolahan data, perbaikan data, Kartu Identitas ASN					15.000.000
Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait					26.000.000	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait					26.000.000
Pengelolaan dan Penataan arsip kepegawaian fisik dan digital					55.530.000	Pengelolaan dan Penataan arsip kepegawaian fisik dan digital					55.530.000
Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		2335 Dokumen	997.287.000	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		2335 Dokumen	997.287.000
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			750 dokumen	704.787.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			750 dokumen	704.787.000
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Mutasi/Rotasi Dan Seleksi Terbuka					554.728.000	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Mutasi/Rotasi Dan Seleksi Terbuka					554.728.000
Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan					33.574.000	Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan					33.574.000
Pelaksanaan Mutasi Antar Daerah/Instansi					37.650.000	Pelaksanaan Mutasi Antar Daerah/Instansi					37.650.000
Penilaian Kompetensi PNS					69.275.000	Penilaian Kompetensi PNS					69.275.000

Honorarium PPTK dan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					9.560.000	Honorarium PPTK dan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					9.560.000
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			2235 Dokumen	292.500.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			2235 Dokumen	292.500.000
Kenaikan Pangkat Terpadu dan Pensiun dengan BKN Periode April					55.500.000	Kenaikan Pangkat Terpadu dan Pensiun dengan BKN Periode April					55.500.000
Penyerahan Petikan Bupati tentang Kenaikan Pangkat secara serentak Periode April					31.500.000	Penyerahan Petikan Bupati tentang Kenaikan Pangkat secara serentak Periode April					31.500.000
Monitoring dan Evaluasi KP Periode April dan Pensiun					40.000.000	Monitoring dan Evaluasi KP Periode April dan Pensiun					40.000.000
Kenaikan Pangkat Terpadu dan Pensiun dengan BKN Periode Oktober					55.500.000	Kenaikan Pangkat Terpadu dan Pensiun dengan BKN Periode Oktober					55.500.000
Penyerahan Petikan Bupati tentang Kenaikan Pangkat secara serentak Periode Oktober					20.000.000	Penyerahan Petikan Bupati tentang Kenaikan Pangkat secara serentak Periode Oktober					20.000.000
Monitoring dan Evaluasi KP Periode Oktober dan Pensiun					40.000.000	Monitoring dan Evaluasi KP Periode Oktober dan Pensiun					40.000.000

Sosialisasi Masa Persiapan Pensiun					25.000.000	Sosialisasi Masa Persiapan Pensiun					25.000.000
Koordinasi dan Konsultasi tentang permasalahan Proses Kenaikan Pangkat dan Pensiun					25.000.000	Koordinasi dan Konsultasi tentang permasalahan Proses Kenaikan Pangkat dan Pensiun					25.000.000
			Persentase peningkatan kualifikasi ASN	83,0%					Persentase peningkatan kualifikasi ASN	83,0%	
Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan		125 orang	75.000.000	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan		125 orang	75.000.000
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			125 orang	75.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			125 orang	75.000.000
Pelaksanaan Ujian Dinas					62.500.000	Pelaksanaan Ujian Dinas					62.500.000
Pelaksanaan Tugas Belajar					12.500.000	Pelaksanaan Tugas Belajar					12.500.000
			Persentase peningkatan kinerja ASN	99,78%					Persentase peningkatan kinerja ASN	99,78%	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		5 Laporan	460.000.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		5 Laporan	460.000.000
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			5 Laporan	255.000.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			5 Laporan	255.000.000

Penyusunan Dokumen Penilaian Kinerja ASN					46.089.400	Penyusunan Dokumen Penilaian Kinerja ASN					46.089.400
Pengujian Kesehatan PNS					98.779.400	Pengujian Kesehatan PNS					98.779.400
Fasilitasi Pemberian Kesejahteraan ASN					10.131.200	Fasilitasi Pemberian Kesejahteraan ASN					10.131.200
Kajian pemberian TPP PNS					100.000.000	Kajian pemberian TPP PNS					100.000.000
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			200 ASN	40.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			200 ASN	40.000.000
Fasilitasi Penghargaan SLKS					36.961.000	Fasilitasi Penghargaan SLKS					36.961.000
Fasilitasi Penghargaan lainnya					3.039.000	Fasilitasi Penghargaan lainnya					3.039.000
				Persentase pelanggaran Disiplin ASN	0,22%					Persentase pelanggaran Disiplin ASN	0,22%
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			100 ASN	165.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			100 ASN	165.000.000
Pembinaan Disiplin ASN					109.969.000	Pembinaan Disiplin ASN					109.969.000
Pembinaan Rumah Tangga ASN					31.250.000	Pembinaan Rumah Tangga ASN					31.250.000
Monitoring dan Evaluasi Implementasi NSPK					23.781.000	Monitoring dan Evaluasi Implementasi NSPK					23.781.000

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			Persentase peningkatan kompetensi ASN	69,53%	2.030.550.000	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			Persentase peningkatan kompetensi ASN	69,53%	4.564.355.400
Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		11.000 orang	976.755.000	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		11.000 orang	1.532.754.400
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			11.000 orang	976.755.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			11.000 orang	1.532.754.400
Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah						Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah					100.000.000
Bimtek Tata Naskah Dinas/Kearsipan						Bimtek Tata Naskah Dinas/Kearsipan					246.000.000
Diklat Komunikasi dan Hubungan Antar Manusia						Diklat Komunikasi dan Hubungan Antar Manusia					204.000.000
Diklat Penyusunan Renstra						Diklat Penyusunan Renstra					164.000.000
Diklat Pengendalian Pencemaran Air						Diklat Pengendalian Pencemaran Air					16.500.000
Diklat Teknik Pengambilan Contoh Limbah Padat B3						Diklat Teknik Pengambilan Contoh Limbah Padat B3					21.300.000

Peningkatan Kapasitas Sekretaris Kecamatan						Peningkatan Kapasitas Sekretaris Kecamatan					46.620.000
PPNS						PPNS					74.925.000
Service Excellent						Service Excellent					74.000.000
EDD PKA						EDD PKA					20.420.000
Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Administrator						Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Administrator					330.000.000
Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Pengawas						Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Pengawas					135.000.000
Mamin, Perjalanan Dinas, Honorarium Narasumber						Mamin, Perjalanan Dinas, Honorarium Narasumber					99.989.400
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		24 laporan	1.053.795.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		24 laporan	3.031.601.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			24 laporan	1.053.795.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			24 laporan	3.031.601.000

Pelatihan Kepemimpinan Nasional						Pelatihan Kepemimpinan Nasional					98.500.000
Pelatihan Kepemimpinan Administrator						Pelatihan Kepemimpinan Administrator					186.800.000
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas						Pelatihan Kepemimpinan Pengawas					114.261.000
Orientasi PPPK						Orientasi PPPK					618.240.000
Diklat Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)						Diklat Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)					340.000.000
Diklat CTU (Contraception Technology Update)						Diklat CTU (Contraception Technology Update)					224.000.000
Diklat Peningkatan Kompetensi Perawat						Diklat Peningkatan Kompetensi Perawat					100.000.000
Diklat Manajemen KKG dan MGMP						Diklat Manajemen KKG dan MGMP					264.000.000
Diklat Bagi Pengawas Sekolah						Diklat Bagi Pengawas Sekolah					75.000.000
Diklat Pengawasan Pengerjaan Jalan dan Jembatan						Diklat Pengawasan Pengerjaan Jalan dan Jembatan					66.000.000
Penggerak Swadaya Masyarakat						Penggerak Swadaya Masyarakat					34.000.000
Diklat Perancang Undang-undang						Diklat Perancang Undang-undang					23.000.000

Diklat Penyusunan Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah						Diklat Penyusunan Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah						1.800.000
Penilaian Kompetensi PNS						Penilaian Kompetensi PNS						786.000.000
Mamin, Perjalanan Dinas, Honorarium Narasumber						Mamin, Perjalanan Dinas, Honorarium Narasumber						100.000.000
TOTAL					10.136.744.333	TOTAL					13.465.549.733	

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto merupakan Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kepegawaian dan tugas pembantuan sehingga dalam pelaksanaannya lebih kepada penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto yang juga selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pelayanan Kepegawaian, tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG, sehingga penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung belum dapat dilaksanakan.

Dapat di uraikan sebagai berikut pada Tabel 2.5 (TC-32)

Tabel 2.5 TC.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN APBD TAHUN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah : **BADAN KEPEGAWAIN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan dasar itu perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui mekanisme dan tahapan – tahapan perencanaan yaitu Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penganggaran pemerintahan pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang substansi penyusunannya merupakan penjabaran Visi, Misi arah pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dan merupakan koridor dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi proyeksi sesuai kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan nasional pasal 20 dan pasal 21 (pimpinan kementrian / lembaga menyusun rancangan renja KL dengan mengacu pada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra – KL serta pagu indikatif, maka dengan mengacu pada peraturan pemerintah tersebut, tujuan, sasaran dan kegiatan pembangunan pada rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Mojokerto tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kementrian/Kelembagaan. Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan nasional yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto meliputi 3 (tiga) kementrian / Kelembagaan yaitu :

1. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementrian PAN – RB memiliki visi “*mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani*” dan misi “Penggerak Utama Reformasi Birokrasi”

Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu :

- a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. Terwujudnya sumberdaya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
- d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta akuntabel;
- e. Mewujudkan aparatur Kementrian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu :

- a. Penataan struktur birokrasi;
- b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;
- c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi pegawai negeri sipil secara terbuka
- d. Profesionalitas pegawai negeri sipil;
- e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah
- f. Peningkatan pelayanan publik;
- g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur
- h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;
- i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri sipil.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementrian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto, yaitu Program Pengembangan ASN, Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian dan Program Penataan ASN. Dimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto melaksanakan penataan pegawai negeri sipil dan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi serta pengadaan ASN secara terbuka.

2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia yang bertugas melaksanakan tuga pemerintahan dibidang manajemn kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkan oleh BKN adalah *“menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil*

berbasis kompetensi” dimana Badan Kepegawaian Negara memiliki strategi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan sumberdaya manusia aparatur, dan pementapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur. Hal ini memberikan arah dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tahun 2024. Program dan Kegiatan yang dimuat dalam Renja merupakan penjabaran dan tindak lanjut dalam Renstra dan Strategi Badan Kepegawaian Negara yaitu Program Pengembangan ASN, Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian

3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Administrasi Negara adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah *“Menjadi Institusi yang Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara”*. Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan mengacu pada visi dan misi LAN diketahui bahwa program dan kegiatan program

pengembangan ASN selaras dengan kebijakan Nasional yang ada pada Lembaga Administrasi Negara.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tahun 2023 adalah **“Meningkatkan Integritas dan Profesionalitas ASN”** dengan Indikator Tujuan Indeks Profesionalitas ASN, Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renja perubahan;
- 2) Menggambarkan arah renja organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renja perubahan.

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi Organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Pada tahun 2024 terdapat satu sasaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu :

“Meningkatnya Profesionalitas ASN”

Pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi Organisasi, yakni strategi Perangkat Daerah yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Meningkatkan kemampuan SDM tentang Administrasi kepegawaian;
2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana BKPSDM
3. Melaksanakan Mutasi dan Promosi yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas PNS;
4. Melaksanakan proses Kenaikan Pangkat PNS;
5. Melaksanakan proses SK Pensiun secara periodik;
6. Melaksanakan proses pelantikan Jabatan Struktural;

7. Melaksanakan proses seleksi terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
8. Melaksanakan proses SK pengangkatan PNS;
9. Melaksanakan proses Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah;
10. Melaksanakan pembinaan PNS secara periodik;
11. Melaksanakan analisis kebutuhan dan formasi PNS;
12. Menyelenggarakan dan Melaksanakan Diklat-diklat Aparatur;
13. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan pelayanan dan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

3.3 Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah

a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Faktor untuk pencapaian visi, misi Kepala;
2. Faktor Isu Strategis penyelenggaraan Tugas Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto;
3. Faktor Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokertodan;
4. Faktor program dan kegiatan rutinitas/operasional Perangkat Daerah.

b. Uraian Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto dalam periode tahun anggaran 2024 menetapkan program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencakup kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan;
- Penyediaan Bahan/Material;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan Mebel
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Kepegawaian Daerah, mencakup kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
 - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN;
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - Pengelolaan Data Kepegawaian.
 - b. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Pengelolaan Mutasi ASN;
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
- c. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 - Pembinaan Disiplin ASN.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, mencakup kegiatan sebagai berikut :
- b. Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
- c. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dapat di uraikan pada Tabel TC- 33

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran diperkuat dengan penjelasan-penjelasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Demi mewujudkan rencana kerja pembangunan daerah. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah juga melakukan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Tabel 4.1
MATRIK RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024

KODE SKPD : 5.03

NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	PAGU SESUAI KEBUTUHAN (USULAN SKPD)
									OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET RENJA 2023		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	5	03				KEPEGAWAIAN								
	5	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A)	BKPSDM	6.030.454.333
											Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 Inovasi	BKPSDM	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target		90%	BKPSDM	10.000.000
	5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 dokumen	BKPSDM	5.000.000
						Penyusunan Renja, RKA, Perubahan Renja , P-RKA, PPRG							BKPSDM	5.000.000
	5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 Laporan	BKPSDM	5.000.000
						Penyusunan LPPD, LKPJ, Laporan Evaluasi Tribulan 1-4, LKJIP							BKPSDM	5.000.000

5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		88%	BKPSDM	5.322.164.000
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			38 Orang/bulan	BKPSDM	5.322.164.000
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						BKPSDM	5.322.164.000
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			IP ASN Perangkat Daerah		82	BKPSDM	80.000.000
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			38 paket	BKPSDM	80.000.000
					Pakaian Dinas Khaki						BKPSDM	14.350.000
					Pakaian Dinas Hitam Putih						BKPSDM	25.000.000
					Pakaian Dinas Batik Diwangkara Wilwatikta						BKPSDM	14.150.000
					Pakaian Olahraga						BKPSDM	25.000.000
					Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						BKPSDM	1.500.000
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		87%	BKPSDM	279.967.353
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	BKPSDM	75.000.000
					Layar Proyektor Otomatis						BKPSDM	5.350.000
					Televisi						BKPSDM	10.650.000
					Laptop						BKPSDM	43.350.000
					Printer						BKPSDM	6.900.000
					Scanner						BKPSDM	7.250.000
					Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						BKPSDM	1.500.000

5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	BKPSDM	14.160.853
					Belanja Makanan dan Minuman serta Snack rapat			BKPSDM	14.160.853
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	BKPSDM	48.150.000
					Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			BKPSDM	48.150.000
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 dokumen	BKPSDM	21.400.000
					Belanja Bahan Bacanan dan Peraturan Perundang-undangan			BKPSDM	21.400.000
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 paket	BKPSDM	39.000.000
					Belanja Alat Tulis Kantor untuk Keperluan Kantor			BKPSDM	39.000.000
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	BKPSDM	9.550.000
					Belanja Makanan dan Minuman serta Snack untuk Tamu			BKPSDM	9.550.000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	BKPSDM	72.706.500
					Belanja Perjalanan Dinas, Akomodasi dan Bantuan Transport			BKPSDM	72.706.500

5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia		12 Unit	BKPSDM	45.000.000
5	03	01	2.07	05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 unit	BKPSDM	45.000.000
					Kursi Kerja						BKPSDM	27.000.000
					Meja Rapat Besar						BKPSDM	16.500.000
					Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						BKPSDM	1.500.000
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		91%	BKPSDM	191.146.880
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	BKPSDM	56.000.000
					Belanja Pembayaran Listrik, Telephone dan Internet Kantor						BKPSDM	56.000.000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	BKPSDM	135.146.880
					Belanja Gaji untuk Tenaga Harian Lepas / Non ASN						BKPSDM	135.146.880
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		88%	BKPSDM	102.176.100

5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	BKPSDM	66.000.000		
					Belanja Pemeliharaan Kendaraan			BKPSDM	60.000.000		
					Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Dinas			BKPSDM	6.000.000		
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	BKPSDM	11.176.100		
					Belanja Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung			BKPSDM	11.176.100		
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	BKPSDM	25.000.000		
					Belanja Pemeliharaan Saranan dan Prasarana Kantor			BKPSDM	25.000.000		
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah			Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi	79%	BKPSDM	2.870.740.000
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	33 dokumen	BKPSDM	1.338.453.000		
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	2 dokumen	BKPSDM	43.000.000		
					Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait			BKPSDM	18.000.000		

						Desk penyusunan kebutuhan ASN							BKPSDM	20.000.000
						Rapat koordinasi usul kebutuhan ASN							BKPSDM	5.000.000
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				3 dokumen			BKPSDM	93.923.000
					Fasilitasi, koordinasi dan konsultasi pengangkatan ASN								BKPSDM	33.000.000
					Penyerahan Keputusan Bupati secara langsung dan Pembekalan ASN								BKPSDM	50.000.000
					Pelaksanaan Sumpah Janji PNS								BKPSDM	10.923.000
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				4 laporan			BKPSDM	800.000.000
					Rapat koordinasi dan konsultasi Pengadaan ASN								BKPSDM	175.000.000
					Pelaksanaan Seleksi Administrasi								BKPSDM	50.000.000
					Pelaksanaan Seleksi Kompetensi								BKPSDM	550.000.000
					Evaluasi pengadaan ASN								BKPSDM	25.000.000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 dokumen			BKPSDM	250.000.000
					Pemeliharaan hardware								BKPSDM	25.000.000
					Pemeliharaan database dan aplikasi sistem informasi								BKPSDM	50.000.000
					Peremajaan hardware								BKPSDM	30.000.000
					Pengembangan aplikasi SIMPEG								BKPSDM	100.000.000

						Fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait						BKPSDM	25.000.000
						Evaluasi sistem informasi kepegawaian						BKPSDM	20.000.000
5	03	02	2.01	11		Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		12 dokumen		BKPSDM	151.530.000
						Rekonsiliasi data ASN						BKPSDM	30.000.000
						Pembuatan DUK, Bezetting, Buku profil ASN dan Buletin kepegawaian						BKPSDM	25.000.000
						Pelayanan pengolahan data, perbaikan data, Kartu Identitas ASN						BKPSDM	15.000.000
						Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait						BKPSDM	26.000.000
						Pengelolaan dan Penataan arsip kepegawaian fisik dan digital						BKPSDM	55.530.000
5	03	02	2.02			Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		2335 Dokumen		BKPSDM	997.287.000
5	03	02	2.02	01		Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		100 dokumen		BKPSDM	704.787.000
						Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Mutasi/Rotasi Dan Seleksi Terbuka						BKPSDM	554.728.000

						Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan							BKPSDM	33.574.000
						Pelaksanaan Mutasi Antar Daerah/Instansi							BKPSDM	37.650.000
						Penilaian Kompetensi PNS							BKPSDM	69.275.000
						Honorarium PPTK dan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa							BKPSDM	9.560.000
	5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			2235 Dokumen		BKPSDM	292.500.000
						Kenaikan Pangkat Terpadu dan Pensiun dengan BKN Periode April							BKPSDM	55.500.000
						Penyerahan Petikan Bupati tentang Kenaikan Pangkat secara serentak Periode April							BKPSDM	31.500.000
						Monitoring dan Evaluasi KP Periode April dan Pensiun							BKPSDM	40.000.000
						Kenaikan Pangkat Terpadu dan Pensiun dengan BKN Periode Oktober							BKPSDM	55.500.000
						Penyerahan Petikan Bupati tentang Kenaikan Pangkat secara serentak Periode Oktober							BKPSDM	20.000.000
						Monitoring dan Evaluasi KP Periode Oktober dan Pensiun							BKPSDM	40.000.000
						Sosialisasi Masa Persiapan Pensiun							BKPSDM	25.000.000

						Koordinasi dan Konsultasi tentang permasalahan Proses Kenaikan Pangkat dan Pensiun						BKPSDM	25.000.000
										Persentase peningkatan kualifikasi ASN	83,0%	BKPSDM	
5	03	02	2.03			Pengembangan Kompetensi ASN			Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	125 orang		BKPSDM	75.000.000
5	03	02	2.03			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		125 orang		BKPSDM	75.000.000
						Pelaksanaan Ujian Dinas						BKPSDM	62.500.000
						Pelaksanaan Tugas Belajar						BKPSDM	12.500.000
										Persentase peningkatan kinerja ASN	99,78%	BKPSDM	
5	03	02	2.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Laporan		BKPSDM	460.000.000
5	03	02	2.04	03		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		5 Laporan		BKPSDM	255.000.000
						Penyusunan Dokumen Penilaian Kinerja ASN						BKPSDM	46.089.400
						Pengujian Kesehatan PNS						BKPSDM	98.779.400
						Fasilitasi Pemberian Kesejahteraan ASN						BKPSDM	10.131.200
						Kajian pemberian TPP PNS						BKPSDM	100.000.000
5	03	02	2.04	04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		200 ASN		BKPSDM	40.000.000
						Fasilitasi Penghargaan SLKS						BKPSDM	36.961.000
						Fasilitasi Penghargaan lainnya						BKPSDM	3.039.000

						PPNS										BKPSDM	74.925.000
						Service Excellent										BKPSDM	74.000.000
						EDD PKA										BKPSDM	20.420.000
						Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Administrator										BKPSDM	330.000.000
						Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Pengawas										BKPSDM	135.000.000
						Mamin, Perjalanan Dinas, Honorarium Narasumber										BKPSDM	99.989.400
	5	03	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				24 laporan	BKPSDM	3.031.601.000	
	5	03	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					24 laporan	BKPSDM	3.031.601.000	
						Pelatihan Kepemimpinan Nasional										BKPSDM	98.500.000
						Pelatihan Kepemimpinan Administrator										BKPSDM	186.800.000
						Pelatihan Kepemimpinan Pengawas										BKPSDM	114.261.000
						Orientasi PPPK										BKPSDM	618.240.000

BAB V PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026. Pada tahun 2024 Pemerintah daerah harus melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Permendari 90 Tahun 2019, Program dan kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja

dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dalam rangka hal tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Badan/Instansi terkait, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

Mojokerto, 30 Juni 2023
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KAB. MOJOKERTO



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660618 199003 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 322817 Fax. (0321) 322817
Website : <http://www.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR: 188/ 12 /416-204/2023
TENTANG

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MOJOKERTO

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, maka setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 ;
11. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

KEDUA : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, serta kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 9satu0 tahun secara berkesinambungan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

KETIGA : Uraian Rencana Kerja Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Juni 2023

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP 19660618 199003 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
MOJOKERTO
NOMOR 188/ 12 /416-204/2023
TANGGAL 30 Juni 2023

MATRIK RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024

KODE SKPD : 5.03

NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	PAGU SESUAI KEBUTUHAN (USULAN SKPD)
									OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET RENJA 2023		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	5	03				KEPEGAWAIAN								
	5	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A)	BKPSDM	6.030.454.333	
										Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 Inovasi	BKPSDM		
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	90%	BKPSDM	10.000.000	
	5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dokumen	BKPSDM	5.000.000	

						Penyusunan Renja, RKA, Perubahan Renja , P-RKA, PPRG						BKPSDM	5.000.000
5	03	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Laporan		BKPSDM	5.000.000
						Penyusunan LPPD, LKPJ, Laporan Evaluasi Tribulan 1-4, LKJIP						BKPSDM	5.000.000
5	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	88%		BKPSDM	5.322.164.000
5	03	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		38 Orang/bulan		BKPSDM	5.322.164.000
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						BKPSDM	5.322.164.000
5	03	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			IP ASN Perangkat Daerah	82		BKPSDM	80.000.000
5	03	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		38 paket		BKPSDM	80.000.000
						Pakaian Dinas Khaki						BKPSDM	14.350.000
						Pakaian Dinas Hitam Putih						BKPSDM	25.000.000
						Pakaian Dinas Batik Diwangkara Wilwatikta						BKPSDM	14.150.000
						Pakaian Olahraga						BKPSDM	25.000.000
						Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						BKPSDM	1.500.000
5	03	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	87%		BKPSDM	279.967.353
5	03	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket		BKPSDM	75.000.000
						Layar Proyektor Otomatis						BKPSDM	5.350.000
						Televisi						BKPSDM	10.650.000

						Laptop							BKPSDM	43.350.000
						Printer							BKPSDM	6.900.000
						Scanner							BKPSDM	7.250.000
						Honorarium Pengadaan Barang/Jasa							BKPSDM	1.500.000
	5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 paket			BKPSDM	14.160.853
						Belanja Makanan dan Minuman serta Snack rapat							BKPSDM	14.160.853
	5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		6 paket			BKPSDM	48.150.000
						Belanja Barang Cetak dan Penggandaan							BKPSDM	48.150.000
	5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		20 dokumen			BKPSDM	21.400.000
						Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							BKPSDM	21.400.000
	5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		6 paket			BKPSDM	39.000.000
						Belanja Alat Tulis Kantor untuk Keperluan Kantor							BKPSDM	39.000.000
	5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan			BKPSDM	9.550.000
						Belanja Makanan dan Minuman serta Snack untuk Tamu							BKPSDM	9.550.000
	5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan			BKPSDM	72.706.500

						Belanja Perjalanan Dinas, Akomodasi dan Bantuan Transport						BKPSDM	72.706.500
5	03	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia		12 Unit	BKPSDM	45.000.000
5	03	01	2.07	05		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 unit	BKPSDM	45.000.000
						Kursi Kerja						BKPSDM	27.000.000
						Meja Rapat Besar						BKPSDM	16.500.000
						Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						BKPSDM	1.500.000
5	03	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		91%	BKPSDM	191.146.880
5	03	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	BKPSDM	56.000.000
						Belanja Pembayaran Listrik, Telephone dan Internet Kantor						BKPSDM	56.000.000
5	03	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	BKPSDM	135.146.880
						Belanja Gaji untuk Tenaga Harian Lepas / Non ASN						BKPSDM	135.146.880
5	03	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		88%	BKPSDM	102.176.100

5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6 unit	BKPSDM	66.000.000	
					Belanja Pemeliharaan Kendaraan					BKPSDM	60.000.000	
					Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Dinas					BKPSDM	6.000.000	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	BKPSDM	11.176.100	
					Belanja Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung					BKPSDM	11.176.100	
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 unit	BKPSDM	25.000.000	
					Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor					BKPSDM	25.000.000	
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah				Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi	79%	BKPSDM	2.870.740.000
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	33 dokumen	BKPSDM	1.338.453.000	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		2 dokumen	BKPSDM	43.000.000	
					Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait					BKPSDM	18.000.000	

						Evaluasi sistem informasi kepegawaian							BKPSDM	20.000.000
5	03	02	2.01	11		Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		12 dokumen			BKPSDM	151.530.000
						Rekonsiliasi data ASN							BKPSDM	30.000.000
						Pembuatan DUK, Bezetting, Buku profil ASN dan Buletin kepegawaian							BKPSDM	25.000.000
						Pelayanan pengolahan data, perbaikan data, Kartu Identitas ASN							BKPSDM	15.000.000
						Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait							BKPSDM	26.000.000
						Pengelolaan dan Penataan arsip kepegawaian fisik dan digital							BKPSDM	55.530.000
5	03	02	2.02			Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		2335 Dokumen			BKPSDM	997.287.000
5	03	02	2.02	01		Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		100 dokumen			BKPSDM	704.787.000
						Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Mutasi/Rotasi Dan Seleksi Terbuka							BKPSDM	554.728.000
						Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan							BKPSDM	33.574.000
						Pelaksanaan Mutasi Antar Daerah/Instansi							BKPSDM	37.650.000
						Penilaian Kompetensi PNS							BKPSDM	69.275.000

						Honorarium PPTK dan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa						BKPSDM	9.560.000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			2235 Dokumen	BKPSDM	292.500.000
					Kenaikan Pangkat Terpadu dan Pensiun dengan BKN Periode April							BKPSDM	55.500.000
					Penyerahan Petikan Bupati tentang Kenaikan Pangkat secara serentak Periode April							BKPSDM	31.500.000
					Monitoring dan Evaluasi KP Periode April dan Pensiun							BKPSDM	40.000.000
					Kenaikan Pangkat Terpadu dan Pensiun dengan BKN Periode Oktober							BKPSDM	55.500.000
					Penyerahan Petikan Bupati tentang Kenaikan Pangkat secara serentak Periode Oktober							BKPSDM	20.000.000
					Monitoring dan Evaluasi KP Periode Oktober dan Pensiun							BKPSDM	40.000.000
					Sosialisasi Masa Persiapan Pensiun							BKPSDM	25.000.000
					Koordinasi dan Konsultasi tentang permasalahan Proses Kenaikan Pangkat dan Pensiun							BKPSDM	25.000.000
										Persentase peningkatan kualifikasi ASN	83,0%	BKPSDM	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan			125 orang	BKPSDM	75.000.000

5	03	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		125 orang	BKPSDM	75.000.000
					Pelaksanaan Ujian Dinas					BKPSDM	62.500.000
					Pelaksanaan Tugas Belajar					BKPSDM	12.500.000
								Persentase peningkatan kinerja ASN	99,78%	BKPSDM	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		5 Laporan	BKPSDM	460.000.000
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		5 Laporan	BKPSDM	255.000.000
					Penyusunan Dokumen Penilaian Kinerja ASN					BKPSDM	46.089.400
					Pengujian Kesehatan PNS					BKPSDM	98.779.400
					Fasilitasi Pemberian Kesejahteraan ASN					BKPSDM	10.131.200
					Kajian pemberian TPP PNS					BKPSDM	100.000.000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		200 ASN	BKPSDM	40.000.000
					Fasilitasi Penghargaan SLKS					BKPSDM	36.961.000
					Fasilitasi Penghargaan lainnya					BKPSDM	3.039.000
								Persentase pelanggaran Disiplin ASN	0,22%	BKPSDM	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		100 ASN	BKPSDM	165.000.000
					Pembinaan Disiplin ASN					BKPSDM	109.969.000
					Pembinaan Rumah Tangga ASN					BKPSDM	31.250.000
					Monitoring dan Evaluasi Implementasi NSPK					BKPSDM	23.781.000

5	04	02				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				Persentase peningkatan kompetensi ASN	69,53%	BKPSDM	4.564.355.400
5	03	02	2.01			Pengembangan Kompetensi Teknis			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		11.000 orang	BKPSDM	1.532.754.400
5	03	02	2.01	03		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		11.000 orang		BKPSDM	1.532.754.400
						Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah						BKPSDM	100.000.000
						Bimtek Tata Naskah Dinas/Kearsipan						BKPSDM	246.000.000
						Diklat Komunikasi dan Hubungan Antar Manusia						BKPSDM	204.000.000
						Diklat Penyusunan Renstra						BKPSDM	164.000.000
						Diklat Pengendalian Pencemaran Air						BKPSDM	16.500.000
						Diklat Teknik Pengambilan Contoh Limbah Padat B3						BKPSDM	21.300.000
						Peningkatan Kapasitas Sekretaris Kecamatan						BKPSDM	46.620.000
						PPNS						BKPSDM	74.925.000
						Service Excellent						BKPSDM	74.000.000
						EDD PKA						BKPSDM	20.420.000
						Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Administrator						BKPSDM	330.000.000
						Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Pengawas						BKPSDM	135.000.000
						Mamin, Perjalanan Dinas, Honorarium Narasumber						BKPSDM	99.989.400

						Diklat Pengawasan Pengerjaan Jalan dan Jembatan												BKPSDM	66.000.000	
						Penggerak Swadaya Masyarakat													BKPSDM	34.000.000
						Diklat Perancang Undang-undang													BKPSDM	23.000.000
						Diklat Penyusunan Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah													BKPSDM	1.800.000
						Penilaian Kompetensi PNS													BKPSDM	786.000.000
						Mamin, Perjalanan Dinas, Honorarium Narasumber													BKPSDM	100.000.000
JUMLAH TOTAL																			13.465.549.733	

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP 19660618 199003 1 011